

**PENGARUH SOSIALISASI SAK EMKM, TINGKAT PENDIDIKAN
PEMILIK, PERSEPSI PELAKU UMKM, DAN PEMAHAMAN
AKUNTANSI TERHADAP IMPLEMENTASI SAK EMKM PADA UMKM
DI KOTA MALANG**

Krisjayanti Parhusip¹⁾, Tuban Drijah Herawati²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia

E-mail: krisjayantip@gmail.com¹⁾, herawati@ub.ac.id²⁾

Abstract: The Effect of SAK EMKM Socialization, Owner's Education Level, MSME Actor's Perception, and Accounting Comprehension on the Implementation of SAK EMKM in MSME in Malang City. This research aims to assess the effect of the socialization of Indonesian Financial Accounting Standard for Micro, Small, and Medium-Sized Entities (SAK EMKM), owner's education level, MSME actor's perception, and accounting comprehension on the implementation of SAK EMKM. The object is MSME owners in Malang city. A number of 93 data was collected through a survey involving respondents selected using purposive sampling. The relations between variables were analyzed using Partial Least Square (PLS) in SmartPLS. This study finds that SAK EMKM socialization, owner's education level, and MSME actor's perception do not positively influence the implementation of SAK EMKM and that accounting comprehension positively influences the implementation of SAK EMKM.

Keywords: SAK EMKM socialization, owner's education level, MSME actor's perception, accounting comprehension, SAK EMKM

Abstrak: Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Tingkat Pendidikan Pemilik, Persepsi Pelaku UMKM, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM. Objek penelitian ini adalah pemilik UMKM di Kota Malang. Sebanyak 93 data dikumpulkan menggunakan metode survei dengan teknik *purposive sampling*. Alat yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, dan persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM, sedangkan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM.

Kata kunci: sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM, pemahaman akuntansi, SAK EMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi (IAI, 2016). Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017 menunjukkan jumlah unit usaha di Indonesia sebanyak 62.928.077 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM memiliki pangsa sebesar 99% serta mengalami peningkatan sebesar 2,06% dari tahun 2016. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang potensial bagi industri jasa keuangan terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan permodalan UMKM dengan memberikan dukungan fasilitas pembiayaan yang berasal dari perbankan. Dukungan pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui alokasi anggaran pemberian jaminan kredit dalam Program Kredit Usaha Rakyat (Kemenkeu, 2015).

Bisnis UMKM tidak selalu berjalan mulus meskipun UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Bank Indonesia (2015:19), UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya.

Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank, baik karena kendala teknis (misalnya tidak mempunyai/tidak cukup agunan), maupun kendala non teknis (misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan). Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, ternyata perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai. Wijaya (2018:16) mengungkapkan bahwa sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan serta sedikit perbankan bisa menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional (secara khusus manajemen keuangan) karena pengelola belum mampu memisahkan uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

Tuti dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa banyak UMKM saat ini hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usaha mereka walaupun pemerintah telah mengupayakan banyak program dalam bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diperoleh melalui bank tertentu seperti Bank Jatim dan Bank UMKM. Alasan UMKM tidak menggunakan modal dari pemberi kredit yaitu karena skala usaha yang masih kecil dan lama usaha masih baru (1-3 tahun). Alasan lainnya adalah rumitnya persyaratan yang diberikan pihak pemberi kredit, misalnya adanya kewajiban UMKM dalam

menyediakan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan sesungguhnya. Akan tetapi, banyak UMKM yang tidak menyediakan laporan keuangan dalam usahanya. Hal tersebut disebabkan UMKM terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Putra dan Kurniawati, 2012).

Usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyadari pentingnya peran UMKM dalam memajukan perekonomian Indonesia dan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009 sebagai bentuk dukungan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan. DSAK IAI melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan asosiasi industri, regulator, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, serta mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016 dan berlaku efektif per 1 Januari 2018. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana

dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Kehadiran SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (IAI, 2016). Laporan keuangan entitas lengkap menurut SAK ETAP mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas (laporan perubahan modal), laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan entitas menurut SAK EMKM mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

SAK EMKM diharapkan menjadi standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM. Namun, penerapan SAK EMKM masih tergolong rendah. Penelitian Nurlaila (2018) pada UMKM Sukma Cipta Ceramic menyatakan bahwa pemahaman pemilik UMKM tentang SAK EMKM masih rendah sehingga pencatatan dan penyusunan laporan keuangan masih sangat sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan serta pemahaman pemilik. UMKM Sukma Cipta Ceramic belum menerapkan SAK EMKM karena belum memahami tentang SAK EMKM, keterbatasan waktu, dan belum adanya sumber daya manusia atau tenaga akuntansi yang profesional pada UMKM tersebut. Begitu pula dengan penelitian Sukiman (2017)

pada UMKM Parfum Athaya Pontianak yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan UMKM tersebut belum menerapkan SAK EMKM, serta hanya mencatat arus kas masuk dan kas keluar.

UMKM sebagai pendorong kemajuan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari keberhasilan UMKM pada setiap daerah, diantaranya adalah Kota Malang. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Berdasarkan survei Dinas Koperasi Kota Malang jumlah UMKM yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang yaitu Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, dan Sukun mencapai 113.000 unit pada tahun 2018. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2017, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur mencapai 54% dan Kota Malang sebesar 85%. Ananda dan Susilowati (2017) mengungkapkan bahwa Kota Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dan daya saing yang kuat melalui produk-produk industri kreatif terbaiknya. Hal ini ditunjang oleh sumber daya manusia inovatif sebagai modal bagi pengembangan perekonomian masyarakat Kota Malang. Produk-produk unggulan terbaik antara lain kerajinan keramik, bordir, kerajinan mebel, perhiasan, kaligrafi, makanan dan lain-lain.

Tingginya potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian tidak membuat UMKM lepas dari kendala terkait pengelolaan keuangan. Sulistyowati (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan pada UMKM di Kota Malang masih sederhana, yaitu hanya melakukan

pencatatan transaksi yang sering terjadi dalam usahanya dan para pelaku UMKM belum memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang kurang serta sosialisasi dari lembaga yang membawahi UMKM atau pihak pemerintah yang masih kurang maksimal sehingga pemahaman akan pentingnya laporan keuangan masih belum dipahami secara utuh oleh pelaku UMKM.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan SAK EMKM telah dilakukan oleh Badria dan Diana (2018) yang menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Kamalia (2017) menyatakan bahwa kebutuhan informasi akuntansi, entitas bisnis, skala usaha, lama usaha, dan sumber pendanaan usaha berpengaruh terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM, tetapi variabel tingkatan pendidikan pelaku usaha dan latar belakang pendidikan pelaku usaha tidak berpengaruh terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus. Janrosl (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM, sedangkan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Sagulung. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK

EMKM pada UMKM di Kota Bogor. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Tingkat Pendidikan Pemilik, Persepsi Pelaku UMKM, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Malang”**.

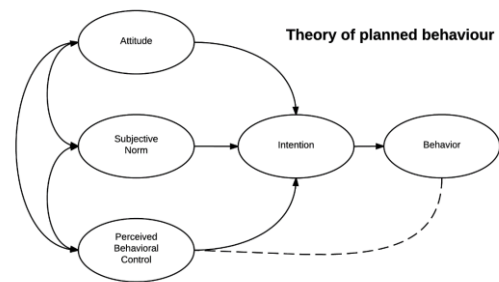
TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of planned behavior merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. *Theory of reasoned action* dimodifikasi dan dikembangkan oleh Icek Ajzen menjadi *theory of planned behavior*, yang menyatakan bahwa *theory of reasoned behavior* hanya dapat digunakan untuk perilaku yang sepenuhnya berada di bawah kontrol individu dan tidak sesuai apabila digunakan untuk menjelaskan perilaku yang tidak sepenuhnya di bawah kontrol individu karena adanya faktor lain yang kemungkinan dapat menghambat atau mendukung tercapainya niat individu untuk berperilaku (Ajzen dalam Ramdhani, 2011).

Theory of planned behavior menyatakan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi dengan tiga hal yaitu *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norm* (norma subyektif), serta *perceived behavioral control* (persepsi pengendalian diri). *Attitude toward the behavior* merupakan keseluruhan

evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. *Subjective norm* merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidak menampilkan suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Ajzen dalam Ramdhani, 2011).

Gambar 1. *Theory of Planned Behavior*



Sumber: (Ajzen dalam Ramdhani, 2011)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

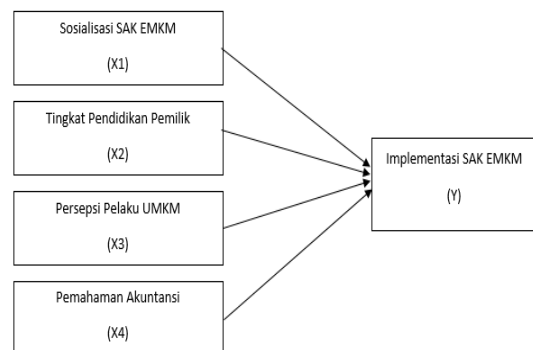
Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan usaha menurut jumlah tenaga kerja. Usaha Mikro memiliki tenaga kerja berjumlah 1-4 orang, Usaha Kecil memiliki tenaga kerja berjumlah 5-19 orang, dan Usaha Menengah memiliki tenaga kerja berjumlah 20-99 orang. SAK

EMKM (2016) menyatakan bahwa entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria di atas, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016:1).

Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini ingin menguji pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM yang berlandaskan pada *Theory of Planned Behavior*. Rerangka teori penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Rerangka Teoritis



Sumber: Data diolah (2019)

Konsep Implementasi SAK EMKM

Theory of planned behavior menyatakan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku, yang dapat diprediksi dengan tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku, persepsi pengendalian diri, dan norma subyektif. Niat merupakan kompetensi dari diri individu yang didasarkan pada keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat individu dipengaruhi oleh keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku, keyakinan individu tentang ada atau tidak adanya faktor pendukung atau penghambat untuk dapat memunculkan perilaku, serta faktor yang berasal dari luar individu yaitu persepsi orang lain dan kelompok yang berpengaruh bagi individu. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan keputusan individu dalam menentukan mau atau tidaknya untuk mengimplementasikan SAK EMKM.

Implementasi adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan, maupun adanya mekanisme untuk suatu sistem (Usman dalam Kusuma dan Lutfiany, 2018:4). SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah dan berlaku efektif mulai tahun 2018. DSAK mengesahkan SAK EMKM untuk membantu proses penyelenggaraan akuntansi secara lebih mudah dan sederhana bagi UMKM. Implementasi SAK EMKM dapat dipengaruhi sikap, persepsi individu, dan pengaruh orang lain.

Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM

Salah satu prediktor niat dalam *theory of planned behavior* merupakan *subjective norm* (norma subyektif), yaitu pandangan individu mengenai tekanan dari lingkungan sekitar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sosialisasi SAK EMKM memerankan komponen norma subyektif dalam penelitian ini. Pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh pelaku UMKM dari sosialisasi SAK EMKM akan memberikan dorongan atau motivasi untuk mengimplementasikan SAK EMKM.

Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu masyarakat (Ritcher dalam Dewi, Yuniarta dan Wahyuni, 2017:4). Sosialisasi SAK EMKM merupakan sosialisasi yang didapatkan oleh pemilik UMKM mengenai SAK EMKM yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang dapat memberikan sosialisasi seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), atau lembaga lainnya.

Hasil penelitian Janrosl (2018) menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM mempunyai pengaruh positif terhadap penggunaan SAK EMKM. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Badria dan Diana (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK EMKM terhadap

diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK EMKM. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁ : Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik Terhadap Implementasi SAK EMKM

Salah satu prediktor niat dalam *theory of planned behavior* merupakan *perceived behavioral control* (persepsi pengendalian diri), yaitu keyakinan individu tentang ada atau tidak adanya faktor pendukung atau penghambat untuk dapat memunculkan perilaku. Keyakinan dapat diperoleh dari pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku dan faktor lain yang dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Tingkat pendidikan pemilik memerankan komponen persepsi pengendalian diri dalam penelitian ini. Apabila pemilik UMKM merasa bahwa tingkat pendidikan yang dimilikinya mumpuni, maka pemilik UMKM akan memiliki motivasi untuk mengimplementasikan SAK EMKM.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal,

nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Kemampuan dan keahlian pemilik UMKM saat ini sangat ditentukan dari pendidikan yang pernah ditempuh baik secara formal maupun nonformal. Tingkat pendidikan formal pemilik (tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas) akan rendah penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkatan pendidikan formal yang tinggi (perguruan tinggi) (Dewi, Yuniarta, dan Wahyuni, 2017). Tingkat pendidikan pemilik merupakan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pemilik UMKM melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Hasil penelitian Dewi, Yuniarta, dan Wahyuni (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK ETAP. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) yang melakukan penelitian terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Bogor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂ : Tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM.

Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM

Salah satu prediktor niat dalam *theory of planned behavior* merupakan *attitude toward the*

behavior (sikap terhadap perilaku), yaitu tingkatan penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku. Persepsi pelaku UMKM memerankan komponen sikap terhadap perilaku dalam penelitian ini. Pelaku UMKM yang percaya bahwa implementasi SAK EMKM akan mengarah pada hasil positif akan memiliki sikap *favorable* terhadap implementasi SAK EMKM dan sebaliknya.

Persepsi adalah tanggapan seseorang dalam memahami apa yang ada di sekitarnya, termasuk dalam hal ini adalah lingkungan berupa objek, orang, atau simbol tertentu. Persepsi bertujuan memberikan makna terhadap hal-hal tersebut melalui pancaindra berdasarkan yang didapat dari lingkungannya. Persepsi dan penilaian seseorang terhadap suatu hal akan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dibuat tentang hal tersebut (Janros, 2018). Persepsi seseorang terhadap sesuatu timbul karena adanya beberapa stimulus yang mempengaruhi persepsi. Pengusaha kecil dapat memiliki informasi yang berbeda dalam menginterpretasikan nilai informasi akuntansi (Sofiah dan Murniati, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badria dan Diana (2018) menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Yuniarta, dan Wahyuni (2017) yang melakukan penelitian terhadap penggunaan SAK ETAP pada UKM di Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian tersebut adalah persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK ETAP.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃ : Persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Implementasi SAK EMKM

Salah satu prediktor niat dalam *theory of planned behavior* merupakan *perceived behavioral control* (persepsi pengendalian diri), yaitu keyakinan individu tentang ada atau tidak adanya faktor pendukung atau penghambat untuk dapat memunculkan perilaku. Keyakinan dapat diperoleh dari informasi yang dimiliki individu yang didapat melalui observasi pada pengetahuan yang dimiliki individu maupun orang lain dan faktor lain yang dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Pemahaman akuntansi memerankan komponen persepsi pengendalian diri dalam penelitian ini. Apabila pelaku UMKM merasa bahwa pemahaman akuntansi yang dimilikinya mumpuni, maka pelaku UMKM akan memiliki motivasi untuk mengimplementasikan SAK EMKM.

Pemahaman akuntansi terkait dengan pelaporan keuangan sangat penting. Pemahaman akuntansi yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan suatu usaha. Pemahaman akuntansi dapat diwujudkan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi (Lohanda, 2017). Pemahaman akuntansi dibutuhkan sebagai dasar dalam memahami dan mengimplementasikan laporan

keuangan sesuai SAK EMKM. Semakin baik pemahaman akuntansi yang dimiliki pelaku UMKM, semakin bagus kemampuan mereka dalam mengimplementasikan SAK EMKM ke dalam laporan keuangan (Kusuma dan Lutfiany, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Bogor menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Pemahaman akuntansi merupakan variabel yang paling dominan terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H₄ : Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menjawab rumusan masalah dan melakukan pengujian hipotesis. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang umumnya dikumpulkan melalui pertanyaan terstruktur (Sekaran dan Bougie, 2016:2). Metode kuantitatif merupakan metode yang ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan *cross-sectional*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dimana data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu atau bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016:104).

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Malang.

Populasi ditentukan berdasarkan data jumlah UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dan Dinas Perindustrian Kota Malang yaitu sebanyak 1.761 UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dan Dinas Perindustrian Kota Malang serta UMKM yang telah membuat/menyusun laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai alat untuk menentukan jumlah sampel. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini setelah dilakukan pembulatan yaitu sebanyak 100 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden yaitu pemilik UMKM di Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Instrumen survei atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Sosialisasi SAK EMKM

Sosialisasi didefinisikan sebagai proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Ritcher dalam Dewi, Yuniarta dan Wahyuni, 2017:4). Penelitian ini menggunakan sosialisasi sebagai variabel sesuai penelitian Kusuma dan Lutfiany

(2018) dengan indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi
2. Tujuan sosialisasi
3. Manfaat sosialisasi
4. Media sosialisasi

Tingkat Pendidikan Pemilik

Jenjang pendidikan adalah tingkatan atau tahapan pendidikan yang harus ditempuh berdasarkan tingkat perkembangan dari peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang ingin dikembangkan. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, nonformal, dan informal (Wahyono dalam Tuti dan Dwijayanti, 2014:5). Penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan pemilik sebagai variabel sesuai penelitian Kusuma dan Lutfiany (2018) dengan indikator sebagai berikut:

1. Pendidikan formal
2. Pendidikan non formal

Persepsi Pelaku UMKM

Persepsi adalah tanggapan seseorang dalam memahami apa yang ada di sekitarnya, termasuk dalam hal ini adalah lingkungan berupa objek, orang, atau simbol tertentu. Persepsi bertujuan memberikan makna terhadap hal-hal tersebut melalui pancaindra berdasarkan yang didapat dari lingkungannya. Persepsi dan penilaian seseorang terhadap suatu hal akan dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi-asumsi yang dibuat tentang hal tersebut (Janros, 2018). Penelitian ini menggunakan persepsi pelaku UMKM sebagai variabel sesuai penelitian Kusuma dan Lutfiany (2018) dengan indikator sebagai berikut:

1. Memudahkan penyusunan laporan keuangan
2. Memudahkan evaluasi, pengendalian, dan pelaporan informasi akuntansi
3. Membantu pengambilan keputusan
4. Memudahkan perolehan pembiayaan
5. Memudahkan mendapat investor
6. Memberikan gambaran kondisi perusahaan

Pemahaman Akuntansi

Kemampuan dalam menangkap baik arti maupun makna dari bahan yang dipelajari merupakan suatu pemahaman (Winkel dalam Kusuma dan Lutfiany, 2018:4). Pemahaman akuntansi terkait dengan pelaporan keuangan sangat penting. Pemahaman akuntansi yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan suatu usaha. Pemahaman akuntansi dapat diwujudkan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi (Lohanda, 2017). Penelitian ini menggunakan pemahaman akuntansi sebagai variabel sesuai penelitian Kusuma dan Lutfiany (2018) dengan indikator sebagai berikut:

1. Memahami transaksi akuntansi
2. Adanya dokumentasi setiap transaksi
3. Memahami tahapan pembuatan laporan keuangan
4. Memahami pencatatan akuntansi
5. Memahami penyusunan laporan keuangan
6. Mampu membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi

Implementasi SAK EMKM

Implementasi adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan maupun

adanya mekanisme untuk suatu sistem (Usman dalam Kusuma dan Lutfiany, 2018:4). SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini menggunakan implementasi SAK EMKM sebagai variabel sesuai penelitian Kusuma dan Lutfiany (2018) dengan indikator sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara teratur
2. Informasi akuntansi sesuai SAK EMKM
3. Telah mengaplikasikan SAK EMKM
4. Manfaat penerapan SAK EMKM

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert modifikasi. Skala likert modifikasi adalah skala yang dirancang untuk memeriksa seberapa kuat responden setuju dengan sebuah pernyataan pada skala 4 dengan tanda sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
 2 = Tidak Setuju
 3 = Setuju
 4 = Sangat Setuju

Model Struktural

Persamaan struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- α : Konstanta
 Y : Implementasi SAK EMKM
 X₁ : Sosialisasi SAK EMKM
 X₂ : Tingkat Pendidikan Pemilik

- X₃ : Persepsi Pelaku UMKM
 X₄ : Pemahaman Akuntansi
 ε : Faktor Kesalahan (*Error*)
 $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menyebarkan 100 eksemplar kuesioner pada pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang. Kuesioner yang direspon sebanyak 100 eksemplar atau sebesar 100% dari keseluruhan kuesioner yang disebar. Sedangkan 7 eksemplar kuesioner tidak dapat digunakan karena responden tidak memenuhi syarat sebagai sampel dalam penelitian karena tidak pernah melakukan pembukuan. Kuesioner yang dapat digunakan untuk pengolahan data adalah sebanyak 93 eksemplar atau sebesar 93% dari seluruh kuesioner yang disebar.

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM dengan rentang umur 26-40 tahun sebanyak 40 orang (43%). Urutan kedua adalah pemilik UMKM dengan rentang umur 41-54 tahun sebanyak 34 orang (37%). Jumlah responden perempuan sebanyak 64 orang (69%), sedangkan jumlah responden laki-laki sebanyak 29 orang (31%). Pendidikan terakhir yang ditempuh mayoritas responden adalah SMA/MA/SMK/MAK sebanyak 44 orang (47%). Urutan kedua adalah pemilik UMKM dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 33 orang (36%). Mayoritas responden merupakan pemilik UMKM yang memiliki usaha di industri pengolahan sebanyak 43 orang (46%). Urutan kedua adalah pemilik UMKM di bidang perdagangan sebanyak 39 orang

(42%). Jumlah karyawan yang dimiliki mayoritas responden ≤ 4 orang, yaitu sebanyak 53 orang (57%). Urutan kedua adalah responden yang memiliki karyawan dengan rentang 5-19 orang sebanyak 39 orang (42%). Mayoritas responden memiliki jumlah kekayaan bersih usaha <Rp50 juta sebanyak 77 orang (83%). Urutan kedua adalah responden yang memiliki jumlah kekayaan bersih usaha dengan rentang Rp50 juta – Rp500 juta sebanyak 15 orang (16%). Omzet tahunan yang dimiliki mayoritas responden adalah <Rp300 juta sebanyak 84 orang (90%). Urutan kedua adalah responden yang memiliki omzet tahunan dengan rentang Rp300 juta – Rp2,5 milyar sebanyak 9 orang (10%).

Total Effects dan Nilai R²

Total effects menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Tabel 1 menyajikan *total effects* dan nilai R². Tabel tersebut menunjukkan nilai konstruk sosialisasi SAK EMKM sebesar 0,107, artinya variasi perubahan konstruk implementasi SAK EMKM dapat dijelaskan oleh konstruk sosialisasi SAK EMKM sebesar 10,7% sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain. Nilai konstruk tingkat pendidikan pemilik sebesar -0,083, artinya variasi perubahan konstruk implementasi SAK EMKM dapat dijelaskan oleh konstruk tingkat pendidikan pemilik sebesar -8,3% sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain. Nilai konstruk persepsi pelaku UMKM sebesar 0,166, artinya variasi perubahan konstruk implementasi SAK EMKM dapat dijelaskan oleh konstruk persepsi pelaku UMKM

sebesar 16,6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain. Nilai konstruk pemahaman akuntansi sebesar 0,597, artinya variasi perubahan konstruk implementasi SAK EMKM dapat dijelaskan oleh konstruk pemahaman akuntansi sebesar 59,7% sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain.

Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Tabel 1 menunjukkan nilai R² sebesar 0,451, artinya variasi perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 45,1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diajukan.

Tabel 1. *Total Effects* dan Nilai R²

	<i>Total Effects</i>	R ²
X1	0.107	
X2	-0.083	
X3	0.166	
X4	0.597	
Y		0.451

Sumber: Data diolah (2020)

Nilai Path Coefficient

Nilai *path coefficient* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor *path coefficient* yang ditunjukkan oleh nilai *t-statistic*, harus di atas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5 persen. Jika nilai *t-statistic* lebih besar dari nilai *t-table* sebesar 1,64 dan nilai *p-values* kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Nilai *path coefficient* disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Nilai *Path Coefficient*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ((O/STDEV))</i>	<i>P Values</i>
X1 ->Y	0.107	0.141	0.106	1.004	0.316
X2 -> Y	-0.083	-0.048	0.088	0.950	0.343
X3 -> Y	0.166	0.141	0.121	1.376	0.169
X4 -> Y	0.597	0.583	0.083	7.230	0.000

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 2 tersebut, berikut uraian hasil pengujian hipotesis:

1. Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan hasil pengujian di dalam tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai beta (β) adalah positif sebesar 0,107, nilai *p-values* sebesar 0,316, dan nilai *t-statistic* konstruk sosialisasi SAK EMKM terhadap implementasi SAK EMKM sebesar 1,004. Nilai *p-values* lebih besar dari 0,05 dan nilai *t-statistic* lebih kecil dari 1,64 sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi SAK EMKM tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM **ditolak** yang artinya ada tidaknya sosialisasi SAK EMKM tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM.

2. Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan hasil pengujian di dalam tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai beta (β) adalah negatif sebesar -0,083,

nilai *p-values* sebesar 0,343, dan nilai *t-statistic* konstruk tingkat pendidikan pemilik terhadap implementasi SAK EMKM sebesar 0,950. Nilai *p-values* lebih besar dari 0,05 dan nilai *t-statistic* lebih kecil dari 1,64 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pemilik tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM **ditolak** yang artinya tinggi rendahnya tingkat pendidikan pemilik tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM.

3. Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan hasil pengujian di dalam tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai beta (β) adalah positif sebesar 0,166, nilai *p-values* sebesar 0,169, dan nilai *t-statistic* konstruk persepsi pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM sebesar 1,376. Nilai *p-values* lebih besar dari 0,05 dan nilai *t-statistic* lebih kecil dari 1,64 sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh

positif terhadap implementasi SAK EMKM **ditolak** yang artinya persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM.

4. Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyatakan bahwa konstruk pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan hasil pengujian di dalam tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai beta (β) adalah positif sebesar 0,597, nilai *p-values* sebesar 0,000, dan nilai *t-statistic* konstruk pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM sebesar 7,230. Nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,64 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa konstruk pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM **diterima** yang artinya semakin baik pemahaman akuntansi, maka semakin besar pengaruhnya terhadap implementasi SAK EMKM.

Pembahasan Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM terhadap Implementasi SAK EMKM

Theory of Planned Behavior memiliki tujuan untuk memahami pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan di bawah kontrol individu serta untuk mengidentifikasi arahan strategi-strategi untuk perubahan perilaku. Teori tersebut berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pemberian sosialisasi oleh pihak eksternal diyakini mampu menambah pengetahuan pelaku UMKM terkait SAK EMKM .

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* sebesar 1,004, nilai tersebut lebih kecil dari nilai *t-table* ($>1,64$) dengan nilai *p-values* sebesar 0,316. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Janrosli (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK EMKM. Janrosli (2018) melakukan penelitian terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM pada UMKM Kecamatan Sagulung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM. Namun, hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Tuti dan Dwijayanti (2014) yang menyatakan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti dan Dwijayanti (2014) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal tersebut disebabkan banyak UMKM yang belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan khusus SAK ETAP. Meskipun sebagian besar UMKM

belum pernah mengikuti kegiatan tersebut, banyak pelaku UMKM yang telah mengikuti sosialisasi atau pelatihan akuntansi seperti penyusunan laporan keuangan sederhana. Secara tidak langsung penyusunan laporan keuangan yang diajarkan merupakan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, namun pelaku UMKM merasa bingung dan tidak mengetahui istilah SAK ETAP. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi SAK EMKM bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Malang.

Pembahasan Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Implementasi SAK EMKM

Kemampuan dan keahlian pemilik UMKM saat ini sangat ditentukan dari pendidikan yang pernah ditempuh baik secara formal maupun nonformal. Tingkat pendidikan formal pemilik (tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas) akan rendah penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkatan pendidikan formal yang tinggi (perguruan tinggi) (Dewi, Yuniarta, dan Wahyuni, 2017).

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* sebesar 0,950, nilai tersebut lebih kecil dari nilai *t-table* (>1,64) dengan nilai *p-values* sebesar 0,343. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kedua ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Yuniarta, dan Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK. Dewi, Yuniarta, dan Wahyuni (2017) melakukan penelitian terhadap penggunaan SAK ETAP pada UKM di Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK ETAP. Namun, hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Kamalia (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemilik tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK. Kamalia (2017) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatan pendidikan pelaku usaha tidak berpengaruh terhadap keinginan UMKM dalam menerima SAK EMKM. Hal tersebut disebabkan dengan adanya aturan SAK EMKM yang berlaku pada tahun 2018 memaksa para pelaku usaha untuk mau menerima dan menerapkan standar tersebut tanpa melihat tingkatan pendidikan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya tingkat pendidikan tidak akan mempengaruhi keinginan menerima SAK EMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pemilik bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Malang.

Pembahasan Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM terhadap Implementasi SAK EMKM

Persepsi adalah tanggapan seseorang dalam memahami apa yang ada di sekitarnya, termasuk dalam hal ini adalah lingkungan berupa objek, orang, atau simbol tertentu. Persepsi bertujuan memberikan makna terhadap hal-hal tersebut melalui pancaindra berdasarkan yang didapat dari lingkungannya. Persepsi seseorang terhadap sesuatu timbul karena adanya beberapa stimulus yang mempengaruhi persepsi. Pengusaha kecil dapat memiliki informasi yang berbeda dalam menginterpretasikan nilai informasi akuntansi (Sofiah, 2014).

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* sebesar 1,376, nilai tersebut lebih kecil dari nilai *t-table* ($>1,64$) dengan nilai *p-values* sebesar 0,169. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Badria dan Diana (2018) yang menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK. Badria dan Diana (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM. Namun, hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh

Janrosi (2018) yang menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM. Janrosi (2018) melakukan penelitian terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM pada UMKM Kecamatan Sagulung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM. Alasan persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM dalam penelitian ini adalah sebagian responden tidak setuju bahwa SAK EMKM memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, memudahkan dalam pelaporan informasi akuntansi, menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, memudahkan untuk melakukan pinjaman pada lembaga keuangan, memudahkan untuk mendapat investor, serta menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Malang.

Pembahasan Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Implementasi SAK EMKM

Pemahaman dalam akuntansi dibutuhkan sebagai dasar dalam mengimplementasikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Seseorang yang dikatakan paham dan pandai akuntansi mengerti bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan. Pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan

yang sesuai standar akuntansi akan mendukung proses implementasi SAK EMKM dan dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya (Kusuma dan Lutfiany, 2018).

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* sebesar 7,230, nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* ($>1,64$) dengan nilai *p-values* sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi, maka semakin besar pengaruhnya terhadap implementasi SAK EMKM.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) yang melakukan penelitian terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Bogor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Bogor.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lohanda (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP pada UMKM kerajinan batik Kecamatan Kraton Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pemahaman akuntansi terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. Untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat digunakan dalam

mengembangkan usaha, pelaku UMKM harus memperhatikan penyampaian informasi keuangan sehingga informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat. Pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pelaku UMKM akan mendorong mereka untuk mengimplementasikan standar akuntansi keuangan dalam usaha yang dijalankan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Malang.

PENUTUP

Studi ini menguji pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Malang. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi SAK EMKM, variabel tingkat pendidikan pemilik, dan variabel persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Variabel pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Hal ini berarti semakin baik pemahaman akuntansi, maka semakin besar pengaruhnya terhadap implementasi SAK EMKM. Pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pelaku UMKM akan mendorong mereka untuk mengimplementasikan standar akuntansi keuangan dalam usaha yang dijalankan.

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan. Penelitian ini tidak memiliki responden dengan omzet tahunan $>Rp2,5$ milyar. Hal ini

dikarenakan data UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian Kota Malang tidak menggolongkan UMKM berdasarkan omzet tahunan, sehingga menyulitkan peneliti dalam menentukan sampel UMKM yang termasuk dalam kategori usaha menengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, yaitu usaha yang memiliki omzet tahunan >Rp2,5 milyar – Rp50 milyar. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data UMKM dari semua kategori sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 supaya penelitian tentang topik ini dapat menjadi lebih akurat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial least square (PLS): alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis*. Yogyakarta: Penerbit C.V Andi Offset.
- Ananda, A. D. & Susilowati, D. (2017). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis industri kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(10), 120-142. Diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6072/0>
- Badria, N. & Diana, N. (2018). Persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK EMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM 1 Januari 2018 (studi kasus pelaku UMKM se-Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(1), 55-66. Diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/899/889>
- Dewi, N. A., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh sosialisasi SAK ETAP, tingkat pendidikan pemilik, dan persepsi pelaku UKM terhadap penggunaan SAK ETAP pada UKM di Kecamatan Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1). Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9472/6056>
- Hertanto, E. 2017. *Perbedaan Skala Likert Lima Skala dengan Modifikasi Skala Likert Empat Skala*. Diakses dari https://www.academia.edu/34548201/PERBEDAAN_SKALA_LIKERT_LIMA_SKALA_DENGAN_MODIFIKASI_SKALA_LIKERT_EMPAT_SKALA
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah*.
- Janrosli, V. S. E. (2018). Analisis persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK EMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 11(1), 97-105. Diakses dari <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/2129>
- Kamalia, A. (2017). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keinginan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menerima SAK EMKM (studi*

- pada UMKM di Kabupaten Kudus*) (Tesis tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Kebijakan fiskal dan peningkatan peran ekonomi UMKM*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kebijakan-fiskal-dan-peningkatan-peran-ekonomi-umkm/>
- Kusuma, I. C. & Lutfiany, V. (2018). Persepsi UMKM dalam memahami SAK EMKM. *Jurnal AKUNIDA*, 4(2), 1-14. Diakses dari <https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/1550/pdf>
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. (2015). *Profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Pages/Profil-Bisnis-UMKM.aspx>
- Lohanda, D. (2017). *Pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP (studi kasus pada UMKM kerajinan batik di Kecamatan Kraton Yogyakarta)* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta). Diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/57297/>
- Meidiyustiani, R. (2016). Pengaruh pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi, dan motivasi pemilik terhadap penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) (studi empiris: perusahaan kecil dan menengah di Kota Tangerang). *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 13-27. Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/accountthink/article/view/439/493>
- Nurlaila. (2018). *Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) pada Sukma Cipta Ceramic Dinoyo-Malang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang). Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/10273/>
- Putra, H. A. & Kurniawati, E. P. (2012). Penyusunan laporan keuangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). *Proceeding for Call Paper Pekan Ilmiah Dosen FEB – UKSW* (pp. 547-580). Diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1281/5/P-ROS_Hermon%20AP-Elisabeth%20PK_Penyusunan%20Laporan%20Keuangan

- %20untuk%20Usaha_Fulltext.pdf.
- Ramdhani, N. (2011). Penyusunan alat pengukur berbasis *theory of planned behavior*. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55-69. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/11557/8615>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods or business 7th edition*. United Kingdom: Penerbit Wiley.
- Sofiah, N. & Murniati, A. (2014). Persepsi pengusaha UMKM keramik Dinoyo atas informasi akuntansi keuangan berbasis entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). *Jurnal JIBEKA*, 8(1). Diakses dari <https://lp2m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Nurhayati-Sofiah-dan-Aniek-Murniati.pdf>
- Sukiman. (2017). Analisis penerapan sistem akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada usaha mikro, kecil, dan menengah (studi kasus UMKM Parfum Athaya Pontianak). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 6(4). Diakses dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/23386>
- Sulistiyowati, Y. (2017). Pencatatan pelaporan keuangan UMKM (study kasus di Kota Malang). *REFERENSI: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 49-55. Diakses dari [x.php/refrensi/article/view/831](https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/831)
- Tuti, R. & Dwijayanti, P. F. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014* (pp. 157-170). Diakses dari <http://repository.wima.ac.id/990/>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses dari <http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan/1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional>
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.